

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

Denny Cendra Bhakti

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Endar Pituringsih

Erna Widiastuty

Universitas Mataram

Jl. Majapahit No 62 Mataram, NTB

denny010777@yahoo.co.id

***Abstract:** The aim of this study is to analyze empirical evidence the influence of budget participation, budget goal clarity and professionalism of human resources of the managerial performance of government of West Nusa Tenggara. Population in this study is Structural Echelons II, III and IV in Government agencies scope West Nusa Tenggara province, as much as 1,075 people. Samples in this study as many as 89 people from 23 government agencies and using Slovin method. Before the test the first hypothesis tested the validity and reliability of the instrument , the classical assumption test and multiple linear regression analysis. The result show that simultaneous participation variable budgeting, budget goal clarity and professionalism of human resources affect the managerial performance at government agencies Provincial Government of NTB. Only, budget goal clarity and professionalism of human resources a significant positive affect, while the budgeting participation negatively impact significantly..*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti empiris pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan profesionalisme sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pemerintahan Nusa Tenggara Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Structural Eselon II, III dan IV di lingkup instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1.075 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 orang dari 23 lembaga Swadaya dan menggunakan metode Slovin. Sebelum tes hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran dan profesionalisme sumber daya manusia mempengaruhi kinerja manajerial pada Pemerintah Provinsi instansi pemerintah NTB. Hanya, kejelasan sasaran anggaran dan profesionalisme sumber daya manusia yang positif signifikan, sedangkan partisipasi penganggaran berdampak negatif signifikan.

Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Kinerja Manajerial

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah memberikan dampak terhadap implementasi sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta perputaran roda ekonomi sehingga menimbulkan tantangan dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan saat ini. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah, yang mengacu pada UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta melakukan pemerataan pembangunan melalui program-program kegiatan dengan skala prioritas, yang disusun melalui partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama (Bangun, 2009). Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain, serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program (Mardiasmo (2009;84). Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja (BPKP, 2005). Wiprastini *et al.* (2014) mengemukakan bahwa adanya sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran partisipatif dan adanya kejelasan sasaran anggaran akan mendorong terlaksananya *good governance* dalam pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme pada dasarnya merupakan kemampuan dan keahlian yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasinya (Supriyatno, 2010). Fenomena yang berkembang mengenai penganggaran sektor publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang dijelaskan oleh Basuki (2014) antara lain : 1) Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap perencanaan, 2) Informasi forum-forum perencanaan belum terpublikasikan secara luas, 3) Usulan masyarakat di Kelurahan/Desa Sedikit yang diakomodasi APBD, dan 4) Tidak ada informasi plafon anggaran . Beberapa hasil temuan penelitian tentang kinerja manajerial masih sering dipedebatkan, misalnya Sembiring (2008) dan Ginting (2009) yang menemukan pengaruh signifikan positif partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Sementara itu, Sumarno (2005) menemukan pengaruh signifikan negatif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya dilakukan oleh Ginting (2009) yang meneliti pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Karo dan menyimpulkan terdapat pengaruh secara simultan partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Karo, serta penelitian

(Supriyatno, 2010) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi pejabat struktural dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, profesionalisme dan struktur organisasi pada kinerja manajerial Pemerintah Kota Denpasar dan menyimpulkan bahwa Partisipasi Pejabat Struktural Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, dan Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun suatu rumusan masalah yaitu Apakah terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Provinsi NTB secara parsial maupun simultan ?

Berdasarkan rumusan masalah yang dibangun, penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Provinsi NTB secara parsial dan simultan.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Anggaran Sektor Publik

Menurut Freeman (2003) anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Pengertian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009;62) merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep anggaran sektor publik pada hakikatnya merupakan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan berusaha memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pelayanan negara terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umum.

Teori Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Yuwono dkk, (2005;34) menjelaskan mengenai pengertian mengenai anggaran berbasis kinerja adalah sebagai sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Sementara menurut Mardiasmo (2009;84) , anggaran berbasis kinerja diartikan sebagai sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sementara itu, Bastian (2006:171) mendefinisikan *Performance budgeting* (Anggaran berorientasi kinerja) adalah “ Sistem penganggaran yang berorientasi pada “*output*” organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan sistematis dengan konsep *value for money* sehingga implementasinya dapat dicapai secara ekonomis, efektif, dan efisien serta dapat dievaluasi secara periodik.

Kinerja Manajerial

Syafrial (2009) mengemukakan kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, Handoko (1996:34) menjelaskan kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Ketika suatu anggaran dirancang secara partisipatif maka karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapai standar yang ditetapkan karena mereka ikut serta terlibat dalam proses penyusunannya yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja.

Mahoney (1963) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain : perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff (*staffing*), negosiasi, dan perwakilan (*representasi*).

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Bangun (2009) menjelaskan partisipasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan. Menurut Suyanto (2011), partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut. Wiryono dan Raharjo (2007) dalam Soetrisno (2010) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggungjawab bersama. Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga sisi psikologis, yaitu seberapa besar pengaruh yang dianggap memiliki seseorang dalam pengambilan keputusan. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan beberapa individu baik secara fisik dan psikologis mencakup mental dan emosional dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kaltsum dan Rohman (2013) mengungkapkan kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Ginting (2009) menjelaskan, adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga akan mempermudah pelaksana anggaran dalam

mempertanggung jawabkan semua program kegiatan yang telah diimplementasikan.

Profesionalisme Sumber Daya Manusia

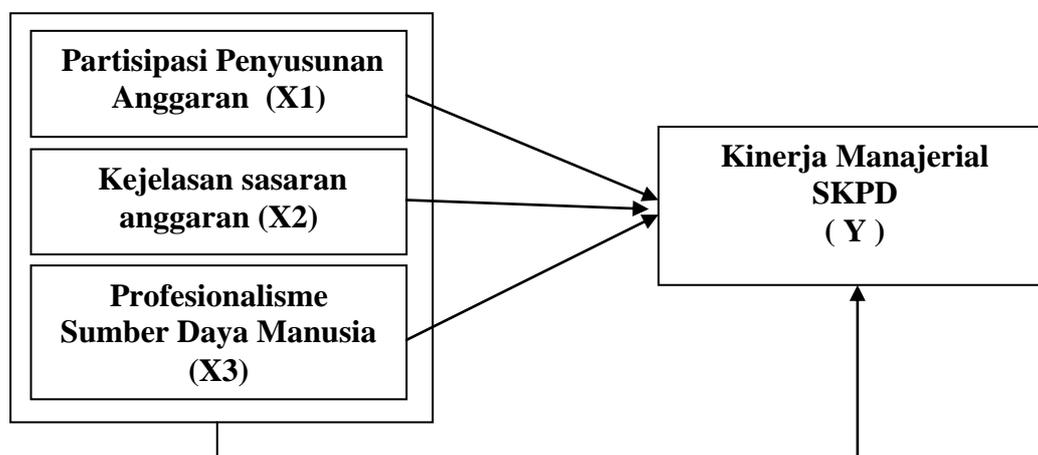
Supriyatno (2010) mengartikan Profesionalisme sebagai cara kerja yang lebih didominasi oleh sikap, bukan hanya satu set daftar dari *skill* dan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, Suryani (2011) mengemukakan bahwa profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuan seorang aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu merespon dinamika lingkungan nasional maupun global termasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan inovasi-inovasi.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme sumber daya manusia merupakan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki seseorang dalam bekerja dan menciptakan inovasi, yang didukung oleh *attitude* personal yang baik dan beretika.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoretis di atas, maka kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap Kinerja manajerial SKPD

Menurut Suardana dan Suryanawa (2010), partisipasi dapat meningkatkan kinerja karena partisipasimemungkinkan bawahan mengkomunikasikan apa yang bawahan butuhkan kepada atasannya. Di dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi disamping dapat memberikan kesempatan memasukkan informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya

Brownell dan McInnes (1986) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ginting (2009) menemukan bahwa terdapat

pengaruh secara simultan maupun secara parsial partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat. Mbon (2014) berpendapat bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini maka akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu hipotesis :
H₁: Diduga partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Provinsi NTB

Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran terhadap Kinerja manajerial SKPD

Tujuan dan sasaran anggaran pemerintah daerah dirumuskan dan ditetapkan melalui instrumen Kebijakan umum anggaran daerah. Wahyuni *et al.* (2014) menjelaskan bahwa Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Wiprastini *et al.* (2014) menyatakan, semakin jelas anggaran yang telah direncanakan sebelumnya melalui prediksi yang akurat mengenai perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang serta didukung oleh struktur organisasi yang terdesentralisasi, maka kinerja manajerial SKPD akan semakin meningkat

Suyanto (2011) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Demikian pula Kaltsum dan Rohman (2013), Mbon (2014), Wahyuni *et al.* (2014), dan Wiprastini *et al.* (2014) menemukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu hipotesis :

H₂ : Diduga Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Provinsi NTB

Pengaruh Profesionalisme SDM terhadap Kinerja manajerial SKPD

Supriyatno (2010) menjelaskan bahwa Sikap atau perilaku (*behaviour*) profesional selalu berbasis pengetahuan dan/atau ketrampilan. Yasier (2011) mengemukakan bahwa kemampuan menunjukkan potensi seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang akan menentukan kesiapannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Hasil penelitian Bonde (2013) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara profesionalisme aparatur pemerintah dengan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, Yasier (2011), Supriyatno (2010), dan Hadadi (2013) menemukan bahwa profesionalisme birokrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₃: Diduga profesionalisme SDM berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Provinsi NTB

Pengaruh Partisipasi anggaran, Kejelasan Sasaran anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kinerja manajerial SKPD

Dimensi dalam partisipasi anggaran antara lain keterlibatan aparat pemerintah dalam penyusunan anggaran, merevisi anggaran, usulan tentang anggaran, banyaknya input, memandang kontribusi/pendapat dalam penyusunan anggaran (Wulandari,2011). Wiprastini *et al.* (2014)menerangkan indikator kinerja yang bersifat finansial tercemin dalam anggaran. Sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Yasier (2011) menemukan bahwa kemampuan kerja (profesionalisme) mempengaruhi kinerja pegawai secara positif dan signifikan. Dari hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Ketika adanya kejelasan sasaran anggaran yang menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran baik yang bersifat arah dan kebijakan umum APBD dengan strategi ataupun prioritas APBD, maka aparat birokrasi akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya.

Untuk memaksimalkan partisipasi dalam menyusun anggaran dan penentuan kebijakan sasaran anggaran sektor publik yang berbasis kinerja, maka diperlukan profesionalisme aparat birokrasi. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjaditanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₄: Diduga Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran dan Profesionalisme SDM berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Provinsi NTB

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai negeri jabatan struktural pada Eselon II,III dan IV sebagai aparat pemerintah yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran belanja dan pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebanyak 1.075. Teknik pengambilan sampel dipergunakan Metode *Stratified Proportional Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dan sebanding dengan stratanya. Jumlah Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan Metode Slovin, yaitu $n = N / (1 + N e^2) = 1.075 / (1 + 1.075 \times 0,1^2) = 91,49 \gg 91$ orang

Jumlah sampel dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 91 orang responden dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Sampel Penelitian

Golongan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Total Populasi	Total Sampel
Golongan IV	47	252	88	387	33
Golongan III	0	27	661	688	58
Total	47	279	749	1.075	91

Sumber : Biro Keuangan Prov. NTB, 2015

Dari jumlah sampel sebanyak 91 responden, maka kuesioner yang kembali adalah sebanyak 89 kuesioner. Sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dalam penelitian ini adalah sebanyak 86,15% ($112/130 \times 100\%$). Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2: Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Dikirim Langsung ke Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV di 23 SKPD	91
2	Kuesioner yang tidak kembali	(2)
3	Total kuesioner yang kembali	89
4	Tingkat Pengembalian (<i>response rate</i>) $89/91 \times 100\%$	97,80 %

Sumber : Data Primer diolah, 2015

Variabel-variabel yang telah diklasifikasikan perlu diberikan definisi secara operasional untuk menjelaskan arah penelitian:

Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran (Ginting, 2009). Variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner yang dikembangkan oleh Ken Milani (1975), yang diadopsi dan dikembangkan dari penelitian Ginting (2009). Setiap responden diminta untuk menjawab 6 (enam) butir pertanyaan dengan indikator pengukuran : a) partisipasi, (b) kontribusi, (c) keterlibatan, (d) permintaan pendapat, (e) usulan kepada atasan dan (f) pembahasan dan penetapan, dengan skala likert 1-5, 5 (SSS=sangat setuju sekali), skor 4 (SS=sangat setuju), skor 3 (S=setuju), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Ginting, 2009). Pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner yang diadopsi dan dikembangkan dari penelitian Ginting (2009), dengan indikator pengukuran : (a) kejelasan sasaran, (b) konsekuensi, (c) pemahaman sasaran, dan (f) ketidakjelasan sasaran. Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan skala likert, di mana skala rendah (1) menunjukkan rendahnya kejelasan tujuan anggaran dan skala tinggi (5) menunjukkan tingginya kejelasan tujuan anggaran, dengan skala likert 1-5,

skor 5 (SSS=sangat setuju sekali), skor 4 (SS=sangat setuju), skor 3 (S=setuju), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

Profesionalisme adalah sikap atau perilaku yang berbasis pengetahuan dan/atau ketrampilan yang didukung dengan semangat pengorbanan, dan integritas dalam melaksanakan tugas, diukur dari; (a) Tingkat pendidikan yang dimiliki; (b) Kemampuan bekerja sama; (c) Kemampuan berkomunikasi (Supriyatno, 2010). Variabel ini diukur dengan Instrumen yang digunakan dalam bentuk kuisioner yang diadopsi dari penelitian Supriyatno (2010). Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, dengan skala likert 1-5, skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

Kinerja Manajerial SKPD adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, investigasi, evaluasi, staffing, dan perwakilan di setiap SKPD. Variabel ini diukur dengan instrumen kuesioner dengan skala 5 (lima) poin yang dikembangkan oleh Mahoney *et al.* (1963) “ *Development of Managerial Performance a Research Approach* “ dan diadopsi dari penelitian Ginting (2009), dengan skala likert 1-5, skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=netral), skor 2 (TS=tidak setuju), dan skor 1 (STS=sangat tidak setuju).

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Untuk keabsahan dari hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan melalui uji validitas dan uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik, lalu melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Program SPSS versi 16.0. Model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

KM	= Kinerja manajerial SKPD
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
X_1	= Partisipasi penyusunan anggaran
X_2	= Kejelasan sasaran anggaran
X_3	= Profesionalisme sumber daya manusia (SDM)
e	= Error term

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan pengujian secara simultan (uji F). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Ketentuan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sementara, untuk Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji-t) maupun uji simultan (Uji-F). Tabel 3 berikut adalah hasil perhitungan dari uji regresi linier berganda dengan bantuan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0 for windows*.

Tabel 3: Hasil analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	t Sig	Keterangan
Konstanta	1.812	3.159	.002	-
Partisipasi Penyusunan Anggaran	-.221	-2.262	.026	Diterima
Kejelasan Sasaran Anggaran	.240	2.066	.042	Diterima
Profesionalisme Sumber Daya Manusia	.486	3.149	.002	Diterima
α	: 5 %			
R Square	: 0.201			
F hitung	: 7.137			
Si F Sig	: 0.000			

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran signifikan dengan nilai sebesar $t=-2.262$ dan tingkat signifikansi $0,026 (<0,05)$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai $t=2.066$ dan tingkat signifikansi $0,042$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD

Begitu juga Variabel profesionalisme sumber daya manusia menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai $t=3.149$ dan tingkat signifikansi $0,002$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesionalisme sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD

Dari hasil pengujian hipotesis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. tersebut, menghasilkan model regresi sebagai berikut :

$$KM = 1,812 - 0,221 X1 + 0,240 X2 + 0,486 X3 + e$$

Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian secara simultan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah 7.137, sementara F-tabel sebesar 2.711 dan nilai probabilitas 0,000. Karena nilai F-hitung > F-tabel dan probabilitas < 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial SKPD atau dapat dikatakan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap Kinerja manajerial SKPD

Hasil analisis data dalam penelitian ini menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. fakta empiris yang diperoleh di lapangan menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran secara umum memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial penganggaran, tapi tidak berhubungan secara linear dengan kinerja manajerial tersebut. Di dalam pelaksanaan anggaran, ada beberapa program kegiatan yang telah disusun melalui anggaran partisipatif oleh pejabat struktural di SKPD, tapi tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Ini terjadi karena kurangnya atensi dan monitoring pejabat yang bertanggung jawab atas program kegiatan yang telah direncanakan, serta adanya intervensi politis dari Pihak Legislatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarno (2005)

Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil analisis data dalam penelitian ini mencerminkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap obyek penelitian, sasaran anggaran pemerintah yang tercantum dalam RJPMD Provinsi NTB telah menjadi acuan bagi SKPD yang ada di lingkup Provinsi NTB dalam menyusun program kegiatan masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan dari pemerintah daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja saat ini mengindikasikan bahwa setiap program kegiatan yang disusun telah memiliki kejelasan sasaran berupa indikator dan tolok ukur kinerja yang terdiri atas masukan, keluaran, dan hasil yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di setiap SKPD. Penetapan indikator kinerja umum di setiap DPA SKPD menunjukkan setiap hasil yang akan dicapai telah terukur dengan jelas, sehingga memudahkan bagi pejabat struktural di SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan sesuai Tupoksi masing-masing SKPD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kenis (1979), Suyanto (2011), Kaltsum dan Rohman (2013), Mbon (2014), Wahyuni et al. (2014), dan Wiprastini et al. (2014) menyatakan terdapat hubungan yang signifikan positif antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Profesionalisme sumber daya manusia terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil analisis data dalam penelitian ini mencerminkan profesionalisme sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial

SKPD pada Pemerintah Provinsi NTB. Hasil pengamatan terhadap obyek penelitian menunjukkan bahwa secara umum, Penempatan pejabat struktural di setiap SKPD telah sesuai dengan kemampuan dan latar belakang yang dimiliki. Alokasi penempatan Pejabat struktural di SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi NTB yang melaksanakan kegiatan teknis, secara umum telah proporsional dengan kebutuhan SKPD tersebut. Hal ini ditandai dengan penempatan Pejabat Struktural SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang ditekuni serta memiliki pengalaman yang cukup matang atas tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Supriyatno (2010), Yasier (2011), Hadadi (2013) dan Bonde (2013) yang menyatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara profesionalisme sumber daya manusia dengan kinerja manajerial dan kualitas pelayanan publik. Hal ini memberikan arti bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja manajerial maupun kinerja pelayanan publik yang akan dihasilkan.

Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan Sasaran anggaran Profesionalisme sumber daya manusia terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil analisis data dalam penelitian ini mencerminkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Provinsi NTB. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin tinggi Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial yang akan dihasilkan.

Peran aktif dari pejabat struktural SKPD dalam menyusun anggaran yang didukung oleh kompetensi dan profesionalisme birokrasi, serta adanya kejelasan sasaran anggaran pemerintah yang dapat menjadi acuan dalam pengukuran kinerja, akan memotivasi para pelaksana anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga berimbas pada pencapaian tingkat kinerja yang diharapkan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Secara Parsial, Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Manajerial malah menurun dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran pejabat struktural di SKPD Provinsi NTB. Hal ini disebabkan kurangnya atensi dan monitoring dari pejabat struktural dalam mengevaluasi usulan program kegiatan yang akan masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) pada SKPD terkait, serta adanya intervensi atau pengaruh politik DPRD selaku pihak legislatif untuk mendesak perubahan program kegiatan pada SKPD. Secara Parsial, Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran dan profesionalisme sumber daya

manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial, Secara Simultan, Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan profesionalisme sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial yang akan dihasilkan. Partisipasi aktif pejabat struktural yang di dukung oleh profesionalisme dan kejelasan sasaran anggaran dalam menyusun program kegiatan, akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD dalam menghasilkan anggaran yang berkualitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya antara lain adalah: 1) ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada pejabat struktural SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sementara anggaran pemerintah daerah dihasilkan oleh peran eksekutif dan legislatif sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini masih kurang relevan. 2) Variabel partisipasi penyusunan anggaran dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa masih memerlukan perhatian atau penyempurnaan atas instrumen penelitian yang digunakan. 3) Penelitian ini kurang mengeksplorasi variabel - variabel lainnya yang mungkin berpengaruh, misalnya umpan balik anggaran, skedul penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan budaya organisasi.

Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah sampel baik dari pejabat struktural SKPD sebagai fungsi eksekutif dan anggota DPR sebagai fungsi legislatif. 2) Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik dengan menambah wawasan dari referensi-referensi terkait penelitian sejenis, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kinerja manajerial SKPD. 3) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD misalnya umpan balik anggaran, skedul penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. 4) Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian yang bersifat investigatif agar bisa lebih mendalami fenomena penganggaran sektor publik, terkait adanya unsur politis pihak legislatif dalam penyusunan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (Studi kasus pada pemerintah kabupaten deli serdang) *Tesis*.USU.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Basuki Prayitno.2014. *Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD Yang Memprioritaskan Kepentingan Umum Di Nusa Tenggara Barat*.Sosialisasi Penyusunan Dan

Bhakti, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran ...

- Pelaksanaan APBD Yang Memprioritaskan Kepentingan Publik Di Provinsi NTB, 2014.
- Bonde, Switika. 2013. Hubungan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*, UNSRAT.
- Brownell, Pete dan M. McInnes. 1986. "Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance". *The Accounting Review*. Vol. LXI(4). October: 587-600.
- Deputi Pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah, Direktorat Pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah wilayah 3. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran berbasis kinerja (Revisi)*. Jakarta.
- Freeman, Roberts J. dan Sholuders, Craig D. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting - Theory and Practice*. Edisi 7. Pearson Education Inc.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, Hartika, Sari. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo. *Tesis*. USU.
- Hadadi, Ahmad. 2013. Analisis Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Dan Pemberian Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. *Journal From JBPTUNPASPP*. Bandung.
- Handoko, T. Hani. 1996. *Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Kaltsum, Ummu Dan Rohman Abdul. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal Of Accounting*: 1-14.
- Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*: 707-721.
- Mahoney, Thomas A, Thomas H. Jerdee, and Stephen J. Carrol, 1963, "Development of Managerial Performance a Research Approach, " Southwestern Publishing
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mbon, Edwin, Fladimir. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *e-journal.uajy.ac.id*.
- Milani, Ken. 1975. The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes : A Field Study. *The Accounting Review*: 274-284.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, *Jakarta*.
- _____. 2005. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, *Jakarta*.
- Sembiring, Abel, S.T. 2008. Pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan Sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Dengan motivasi sebagai variabel

- intervening Pada kawasan industri medan, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Di Kabupaten Rembang). *Tesis*. UNDIP.
- Suardana, Kadek Juli dan Suryanawa, I Ketut. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. UNUD Denpasar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarno, J. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia Di Jakarta), *SNA VIII Solo*, 15-16 September 2005.
- Supriyatno. 2010. Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme Dan Struktur Organisasi Pada Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Denpasar. *Tesis*. UNUD.
- Suriyani Erna . 2011. Profesionalisme Aparatur Pemerintah (Kasus Pada Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. *Jurnal Socioscientia* Kopertis Wilayah XI Kalimantan.
- Suyanto. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (pada Pejabat Eselon II dan III di SKPD Kota Metro.UM Metro Lampung.
- Syafrial. 2009. Pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran,kejelasan saran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD pada pemerintahan kabupaten Sarolangun. *Tesis*.USU.Medan
- Wahyuni , Raja Adri Satriawan Surya, Enni Savitri.2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *jom.unri.ac.id*.
- Wiprastini, Yuli, I Gusti Ayu Ketut, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Trisna Herawati. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada 15 SKPD Berupa Dinas Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi* Volume 2 No. 1.
- Wulandari, Nur endah. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). UNDIP.
- Yasier Afdhal. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Kapuas hulu. *Tesis*. Program Pascasarjana Unversitas Terbuka,Pontianak.
- Yuwono Sonny. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan,Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, Media Publishing. Malang.